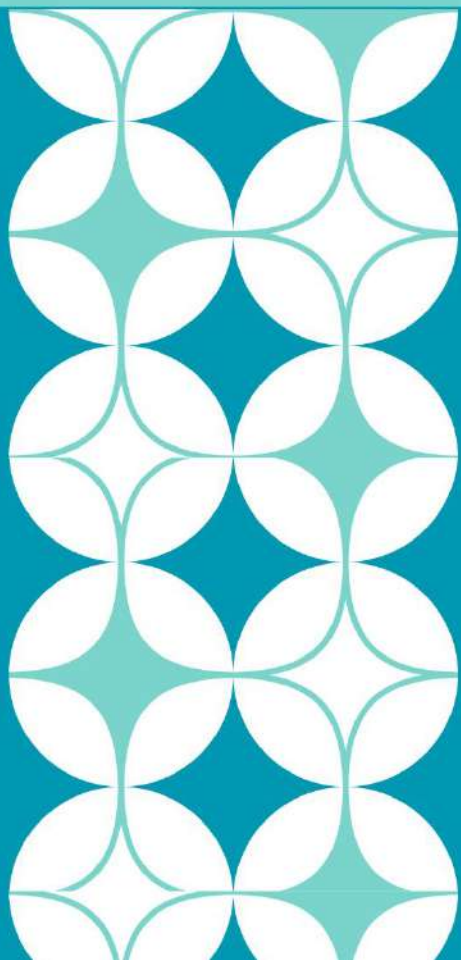




**20
26**



RENCANA KINERJA

**KECAMATAN PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Cahyana Baru, Penambongan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 telah dapat diselesaikan. Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah disusun ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Rivieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata ara Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah,serta tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang secara substansi mengamanatkan Penyusunan Rancangan Awal Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) untuk mendukung sucseunya Pencapaian Sasaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, kami menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerh Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak agar lebih baik dimasa yang akan datang, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga ini diucapkan terima kasih

Demikian dan semoga dokumen ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (*decision maker*) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 21 Juli 2025

Camat Purbalingga



Dra. YUNI RAHAYU, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19690601 198803 2 001

DAFTAR ISI

Contents

kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bab I	1
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
Bab II	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Pada Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Kecamatan Purbalingga	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Purbalingga	16
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggara Tugas Dan Fungsi Kecamatan Purbalingga.....	31
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd	35
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	41
Bab III	42
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Purbalingga	48
3.3 Program Dan Kegiatan Kecamatan Purbalingga	48
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	53
Bab V Penutup.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024 Kecamatan Purbalingga.....	9
Tabel 2. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2024	18
Tabel 2. 3 Profil Bumdes Kecamatan Purbalingga	32
Tabel 2. 4 Prevalensi Stunting Kecamatan Purbalingga	33
Tabel 2. 5 Jumlah Ats Berdasarkan Umur.....	35
Tabel 2. 6 Jumlah Ats Berdasarkan Pendidikan Terakhir	35
Tabel 2. 7 Review Terhadap Rancangan Akhirrkpd Tahun 2026 Kabupaten Purbalingga .	37
Tabel 3. 1 Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Dan Target Tahun 2026	47
Tabel 3. 2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Purbalingga 2026	48
Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, Kecamatan Purbalingga Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan. Penyusunan Renja ini merupakan bagian dari siklus sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2026, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, periode 2025-2029, menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam lima tahun kedepan adalah arah penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam lima tahun ke depan adalah

“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”

Disamping Visi Kabupaten Purbalingga juga mempunyai Misi, Misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bangkitkan Ekonomi Rakyat : Peberdayaan Ekonomi local melalui pengambangn UMKM dan Modernisasi sektor Pertanian;
2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan : Peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektifitas ekonomi;
3. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik : Digitalisasi Pelayanan Publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi;
4. Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk membangun SDM yang Unggul.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai Landasan Hukum Penyusunan Rancangan awal Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Purbalingga Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi DJawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawar Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penetapan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
14. Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan belanja daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Pemerintah Daerah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga adalah tersedianya suatu dokumen untuk mengetahui dalam bentuk perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program-program dan kegiatan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dengan Program dan Kegiatan yang dengan harapan untuk dapat mendorong Pembangunan di wilayah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga serta mendorong partisipasi aktif masyarakat Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga sebagai acuan dan tolak ukur bagi Camat selaku pimpinan PD Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga serta seluruh perangkat Kecamatan Purbalingga dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

1.3.2 TUJUAN

Adapun Tujuan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, mensinkronisasikan program dan kegiatan Pemerintah Daerah

Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dengan Target dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam Dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum yang kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan 1 (satu) Tahun ke depan;
2. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Purbalingga;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun Program Kegiatan Tahunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga untuk memahami kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Purbalingga Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I .PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Ranwal Renja Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Purbalingga
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Purbalingga
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Purbalingga
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III .TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan tentang Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Kecamatan
Purbalingga

3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Purbalingga

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PURBALINGGA

BAB V . PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PURBALINGGA

Kecamatan Purbalingga pada tahun anggaran 2024 telah melaksanakan 6 (enam) Program 13 Kegiatan 27 Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Program dan Kegiatan tersebut termasuk dalam Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN KOTA

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN
 - 1.2.3 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKP
- 1.3. Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penatausahaan barang milik daerah pada PD
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 1.4.2. Penyediaan bahan logistik kantor
 - 1.4.3. Fasilitas Kunjungan tamu
 - 1.4.4. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi PD
 - 1.4.5. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada PD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.6.2. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kantor atau Lapangan

1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.3. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan

2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat

2.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan pelayanan Perizinan non usaha

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1 Koordinasi kegiatan Pemberdaya desa

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Form Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan

4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penegasan Kepala Negara
 - 5.1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- 6.1 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 6.1.1 Fasilitas Administrasi Tata pemerintahan Desa
 - 6.1.2 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Secara ringkas capaian pelaksanaan renja akan disajikan dalam rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Purbalingga tahun 2024 yang ditunjukkan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELASANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 KECAMATAN PURBALINGGA

9

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	NA	NA	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	84 Orang / Bulan	84 Orang / Bulan	100%	84 Orang / Bulan	84 Orang / Bulan	100%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	NA	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	30 laporan	30 laporan	100%	30 laporan	30 laporan	100%
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

				Daerah									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	NA	NA	9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 unit	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	NA	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporanpelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	NA	NA	7 lembaga	7 lembaga	100%	7 lembaga	7 lembaga	100%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				UMUM									
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Potensi Konflik	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	NA	NA	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 orang	100%
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Purbalingga Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Purbalingga. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PURBALINGGA

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Purbalingga berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta berdasarkan Renstra Kecamatan Purbalingga Tahun 2021 s.d 2026. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Purbalingga dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain:

A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian atas target kinerja bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum meliputi beberapa jenis, antara lain:

1. Pelayanan Masyarakat / PATEN yang meliputi pelayanan:
 - 1.1. Pelayanan Perizinan:
 - 1.1.1. Pelayanan Izin Dispensasi Nikah;
 - 1.1.2. Pelayanan Izin Keramaian;
 - 1.1.3. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
 - 1.2. Pelayanan Nonperizinan:
 - 1.2.1. Pelayanan KTP dan KK;
 - 1.2.2. Pelayanan Keterangan Domisili WNI dan WNA;
 - 1.2.3. Pelayanan Surat Keterangan Usaha;
 - 1.2.4. Pelayanan PPAT;
 - 1.2.5. Pelayanan Legalisasi Surat;
2. Fasilitasi pembuatan Peraturan Desa (Perdes dan Perkades);
3. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
4. Pendampingan pengadaan Perangkat Desa;
5. Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan;

6. Fasilitasi Pelatihan Satlinmas/Hansip;
7. Melaksanakan Kegiatan HUT RI;
8. Melaksanakan kegiatan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga;
9. Fasilitasi/koordinasi pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanggulangan bencana bersama-sama forkopimcam dan instansi terkait;
10. Pelaksanaan Operasi Jam Malam bersama Unsur TNI-POLRI-Satpol PP;
11. Pelaksanaan operasi pendisiplinan pemakaian masker bagi masyarakat bersama-sama Unsur TNI-POLRI-Satpol PP;
12. Pengkoordinasian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
13. Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang lainnya.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sepanjang meliputi beberapa program dan agenda yang meliputi:

1. Memfasilitasi/Koordinasi Penyelenggaraan Musdes/Musrenbandes di tingkat desa;
2. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan;
3. Mengikuti Musrenbang tingkat Kabupaten;
4. Rekomendasi Proposal-proposal Bangub/BanProv, ADD, DD;
5. Melaksanakan *Roadshow* UMKM;

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat PD Kecamatan Purbalingga dapat dilihat melalui beberapa program dan agenda seperti di bawah ini:

1. Melaksanakan kegiatan Istighozah;
2. Mengikuti kegiatan Pawai Ta'aruf;
3. Mengikuti kegiatan Hari Santri;
4. Mengikuti kegiatan perlombaan di bidang seni budaya dan olahraga;
5. Mengikuti kegiatan PKK;
6. Mengikuti kegiatan Dharma Wanita;
7. Mengikuti kegiatan GOPTKI;
8. Penyaluran Bansos dan Bankesra;
9. Menghimpun dana PMI;
10. Mengikuti kegiatan Sunatan massal dan Nikah Massal;

Kegiatan Penyaluran Bansos dan Bankesra, serta menghimpun dana PMI dilaksanakan Bidang Kesejahteraan Rakyat PD Kecamatan Purbalingga sebagai pelaksanaan tugas dari pemerintah daerah untuk membuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2024

No .	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	91.5	93.85	102.51
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91.5	93,85	102.51
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	33	33	100
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	66	64,86	97,27

Berdasarkan tabel diatas secara umum capaian kinerja Kecamatan Purbalingga menunjukkan hasil yang baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan dengan target 91.5 berhasil terealisasi sebesar 93.85 atau mencapai 102.51%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Purbalingga telah memenuhi ekspektasi yang ditetapkan.

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yakni antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai unsur pelayanan sebagai berikut.

Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : *Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan pada unsur pelayanan dilakukan dengan analisis statistik deskriptif. Jawaban responden dikategorikan menjadi empat kategori yakni tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terkait mutu pelayanan disetiap unsur. Berikut ini kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Purbalingga:

Kategori unsur layanan pada Kecamatan Purbalingga

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM	NILAI KONVERSI	MUTU PELAYANAN	UKURAN KINERJA
1	Persyaratan	3,758	93,95	A	Sangat Baik
2	Prosedur	3,633	90,825	A	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,642	91,05	A	Sangat Baik
4	Biaya	3,944	98,6	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi dan Jenis Layanan	3,656	91,4	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,812	95,3	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,748	93,7	A	Sangat Baik
8	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	3,899	97,475	A	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,729	93,225	A	Sangat Baik
NRR Tertimbang/unsur		3,754			
IKM UNIT PELAYANAN			93,853	A	Sangat Baik
JUMLAH RESPONDEN = 425					

Sumber: *Aplikasi Alpukat*

Berdasarkan tabel diketahui bahwa jumlah responden pada unit layanan Kecamatan Purbalingga adalah sejumlah 425 responden, dan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Purbalingga Tahun 2024 memperoleh nilai Sangat Baik (A) dengan angka 93.85. Secara detail uraian mutu pelayanan pada tiap unsur adalah sebagai berikut:

a. Unsur Persyaratan

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa mayoritas responden menganggap kinerja unit pelayanan dari aspek persyaratan pelayanan di Kecamatan Purbalingga SANGAT BAIK, yakni dengan nilai SKM 93,95 dan mutu pelayanan (A). Dari survei yang telah dilakukan dinyatakan bahwa unsur persyaratannya sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Masyarakat tidak merasa terbebani atau ribet hanya saja butuh sosialisasi lagi mungkin dengan cara di tempet dipapan pengumuman untuk persyaratan yang harus di penuhi agar tidak terjadi kesalahan.

b. Unsur Prosedur

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa Mutu Pelayanan di Kecamatan Purbalingga pada unsur prosedur pelayanan dinilai SANGAT BAIK dengan nilai SKM 90.825 (A). Dari survei yang telah dilakukan Kecamatan Karangjambu sudah cukup baik dari unsur prosedur pelayanannya. Alur pelayanan sudah cukup jelas dan dilakukan sesuai prosedur. Namun, masyarakat desa tetap perlu diberikan sosialisasi tentang bagaimana cara mengurus kepentingan yang dapat dilakukan di kantor kecamatan.

c. Unsur Waktu Pelayanan

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Purbalingga dari unsur waktu pelayanan masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai 91.05 (A) . Pada dasarnya secara umum responden menganggap bahwa waktu pelayanan sudah cepat. Dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pegawai telah memberikan pelayanan secara cepat dan sudah bekerja dengan maksimal.

d. Unsur Biaya/Tarif

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Purbalingga dari unsur biaya masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai 98.6 (A). Sebagian besar responden memang mengharapkan biaya layanan yang gratis. Hasil wawancara dengan beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak perlu membayar untuk mendapatkan layanan legalisasi dan pengantar. Legalisasi dan pelayanan-pelayanan di kantor Kecamatan Purbalingga gratis.

e. Unsur Produk Layanan

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan dari unsur

Produk spesifikasi jenis layanan masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai 91.4 (A). Dari hasil survei masyarakat menyatakan bahwa produk pelayanan yang di hasilkan Kecamatan Karangjambu masuk kategori baik dan sudah puas dengan hasil pelayanan yang telah diberikan. Namun, walaupun demikian petugas tetap harus meningkatkan kembalikualitas pelayanan hasil jadi produk agar lebih maksimal.

f. Unsur Kompetensi Pelaksana

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan kecamatan Purbalingga dari unsur kompetensi masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai 95.3 (A). Namun, kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dari survei yang kami dapatkan ada beberapa responden yang mengeluhkan mengenai jumlah pegawai yang ada dibagian *frontline* kurang memadai dikarenakan ketika diwaktu tertentu ada banyak pengunjung yang sedang mengurus kepentingannya di kantor tersebut dan diwaktu yang bersamaan ada salah satu pegawai bagian *frontline* yang sedang sibuk mengurus kepentingan yang harus keluar masuk ruang pekerjaan, dan dengan keadaan tersebut terkadang dikeluhkan oleh masyarakat. Adapula kompetensi atau kemampuan pegawai yang ada di kantor kecamatan tersebut juga harus ditingkatkan. Serta kedisiplinan waktu kerja pegawai *frontline* juga harus ditingkatkan.

g. Unsur Perilaku Pelaksana

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Purbalingga dari unsur perilaku pelaksana masuk dalam kategori SANGAT BAIK dengan nilai 93.7 (A). Di unsur perilaku petugas hasil survei menyatakan bahwa petugas cukup ramah dan cekatan dalam bekerja. Masyarakat merasa terbantu dan tidak merasa kesulitan dalam meminta pelayanan karena informasi dari petugas memang sudah jelas.

h. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Kinerja unit layanan Kecamatan Purbalingga dalam unsur penanganan pengaduan, saran & masukan, berdasarkan hasil survei adalah SANGAT BAIK dengan nilai 97.475 (A). Pengelolaan pengaduan sudah ada, namun kurang berfungsi secara maksimal.

i. Unsur Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa dalam unsur sarana dan prasarana masuk dalam kategori SANGAT BAIK dengan nilai 93.225 (A). Di unsur sarana prasarana di kantor kecamatan Purbalingga dinilai sudah cukup memadai. Terdapat pojok baca, pusat informasi, area bermain anak dan tempat pelayanan yang bersih dan rapi.

Selanjutnya dari hasil SKM tersebut beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam perbaikan adalah:

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu			Penanggung Jawab
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang	
1.	Persyaratan	Deregulasi Persyaratan Pelayanan	-	Evaluasi dan penyederhanaan persyaratan pelayanan	Digitalisasi persyaratan layanan	Pemtramti bum
2.	Prosedur	-	-	-	-	-
3.	Waktu Pelayanan	Peningkatan kapasitas pelayanan pada jam sibuk (<i>rush hour</i>)	Pemetaan kebutuhan Sumber Daya	Implementasi Peningkatan kapasitas pelayanan pada jam sibuk (<i>rush hour</i>)	-	Unit/ Seksi pemtramti bum
4.	Biaya/ Tarif	-	-	-	-	-
5.	Produk layanan	Inovasi dalam peningkatan quality control	Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap proses kerja (<i>business process</i>)	Penambahan fungsi <i>quality control</i> dalam menjamin produk pelayanan	-	Unit/ Seksi pemtramti bum
6.	Kompetensi Pelaksana	Peningkatan kompetensi pelaksana	Evaluasi kompetensi pelaksana	Diklat atau seminar peningkatan kompetensi pelaksana	Membangun kompetensi berbasis Teknologi informasi	Unit/ Seksi PMD
7.	Perilaku Pelaksana	Peningkatan pelayanan prima	Evaluasi pelayanan prima	Diklat pelayanan prima	-	Unit/ Seksi pemtramti bum
8.	Sarana & Prasarana	Penambahan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan	Pemetaan kebutuhan penambahan fasilitas pendukung layanan	Pemenuhan kebutuhan penambahan fasilitas pendukung layanan	-	Unit/ Seksi Pemtramti bum
9.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	Optimalisasi fungsi pengaduan masyarakat	Sosialisasi Penanganan Pengaduan berbasis internet	Menyiapkan sarana & prasarana penanganan pengaduan berbasis internet	Penyelenggaraan penanganan pengaduan berbasis internet	Unit/ Seksi Pemtramti bum

Selanjutnya diuraikan secara umum analisis kelebihan dan permasalahan/kelemahan unsur layanan sebagai berikut :

1. Tiga unsur dengan nilai tertinggi yaitu : urutan pertama adalah Unsur Biaya/Tarif dengan nilai 98.6, kemudian Unsur Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dengan nilai 97.475 dan urutan ketiga adalah Unsur Kompetensi Pelaksana dengan nilai 95.3. Hal ini dikarenakan tidak adanya pungutan di semua pelayanan yang diberikan, kemudahan akses untuk pengaduan, saran dan masukan, serta di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan memahami tugas pokok fungsi.
2. Sedangkan tiga unsur dengan nilai terendah yaitu: Komponen unsur prosedur mendapatkan nilai terendah yaitu 90.825, selanjutnya unsur waktu pelayanan menempati posisi terendah kedua dengan nilai 91.05 dan unsur produk spesifikasi jenis pelayanan menempati posisi ketiga dengan nilai 91.4.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM adalah sebagai berikut :

- a. Untuk unsur prosedur, akan disusun prosedur pelayanan yang ringkas dan memasang ditempat yang mudah dilihat oleh penerima layanan.
- b. Untuk unsur waktu pelayanan, dengan diperbaikinya prosedur pelayanan yang ringkas akan tercipta sistem pelayanan yang cepat, tepat dan akurat.
- c. Untuk unsur Produk spesifikasi jenis pelayanan, akan disusun spesifikasi jenis pelayanan dan memasang di tempat yang strategis.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya pada indikator Nilai Kematangan Kelembagaan Perangkat Daerah, target sebesar 33 terealisasi sebesar 33 atau mencapai 100% yang berarti target telah tercapai secara optimal. Adapun rincian nilai Kematangan OPD Kecamatan Purbalingga sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini :

Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Purbalingga Tahun 2024

No.	Variabel	Nilai	Indikator
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.
2.	Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	3	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan
3.	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	3	Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	2	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP).
5.	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	3	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan
6.	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	5	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi
7.	Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur	3	Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah.
8.	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	1	Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah.
9.	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	4	Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.
10.	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	2	Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).
11.	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	2	Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan.

Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa variabel yang mendapatkan nilai terendah dengan skor 1 adalah variabel 8 yaitu "Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas

Aparatur”. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Purbalingga sama sekali belum menyusun register resiko seluruh kegiatan sesuai dengan Renstra OPD, belum sepenuhnya melaksanakan SPIP sekaligus menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Selanjutnya nilai variabel yang masih berada di Tingkat 2 yaitu:

1. Variabel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah.
Dalam pelaksanaan tugas, Pemerintah Kecamatan Bojongsari telah menyusun SOP, namun belum dilaksanakan evaluasi dan reviu secara berkala atas implementasi SOP tersebut.
2. Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah
3. Budaya Organisasi Perangkat Daerah

Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan kinerja tahun – tahun berikutnya, Pemerintah Kecamatan Purbalingga akan berupaya memenuhi persyaratan pada variabel yang nilai kematangannya masih rendah, serta meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal instansi pemerintah (SPIP).

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah adalah :

1. Belum seluruh pegawai berkomitmen mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal, khususnya gagasan ide inovasi yang dapat mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang lebih efeki dan efisien’.
2. Budaya kerja organisasi yang belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal sebagai sarana diskusi sehingga dapat mendorong pemahaman pegawai atas pentingnya kolaborasi dalam pencapaian kinerja organisasi, serta mendorong terwujudnya gagasan inovasi oleh pegawai serta memantau implementasi dan keberlanjutannya.
2. Mendorong implementasi budaya kerja yang berorientasi kinerja melalui pelaksanaan evaluasi kinerja berkala serta menyusun kebijakan *pemberian reward and punishment* berbasis kinerja, sehingga akan mendorong setiap individu untuk bertanggungjawab atas target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis Kecamatan “Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan” adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara itu nilai SAKIP Kecamatan dengan target 66 terealisasi sebesar 64.86 atau mencapai 97.27%. meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut tetap menunjukkan kinerja yang baik dan mendekati target yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor : 700.1.2/066.2.kl/2024R tanggal 24 September 2024, hasil evaluasi AKIP Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan nilai 64.86 Kategori Baik dengan nilai per komponen sebagai berikut :

Nilai SAKIP Kecamatan Purbalingga Tahun 2024

Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	21.00
Pengukuran Kinerja	30	18.60
Pelaporan Kinerja	15	9,75
Evaluasi Internal	25	15,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	64.86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : *LHE Inspektorat Tahun 2024*

Adapun hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

1. Dokumen perencanaan kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Kasi Kesra & Perjanjian Kinerja kasubbag Umum & Kepegawaian terlambat diunggah ke esr.menpan.go.id, kemudian untuk dokumen perencanaan kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024, Rencana Kinerja2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025, Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2024, Rencana Aksi 2024 dan DPA 2024 belum dibublikasikan pada website Kecamatan Purbalingga.
2. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Permen PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 karena belum sesuai dengan Prinsip-

prinsip teknis pada saat penyusunan Pohon Kinerja, yaitu belum terlihat adanya identifikasi *cross-cutting* kinerja;

3. Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Terdapat beberapa indikator Kinerja sub Kegiatan yang diterapkan tidak sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - b. Matrik Rencana Kerja belum sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah kabupaten Purbalingga.
4. Target-target kinerja triwulanan yang ditetapkan pada rencana aksi tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang ingin dicapai.
5. Masih terdapat capaian program dan kegiatan yang belum *on the right track*.

b. Pengukuran Kinerja

1. Rapat – rapat/monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun belum didokumentasikan dengan memadai sehingga penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas belum terpantau efektifitas tindak lanjutnya;
2. Pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun terdapat ketidakkonsistenan target kinerja triwulanan, dimana beberapa target indikator kinerja program/kegiatan pada rencana aksi berbeda dengan target indikator kinerja program/kegiatan pada PPS dan PKPK.
3. Aplikasi pengumpulan dan pengukuran kinerja yang tersedia yaitu E-SAKIP (<https://sakup.purbalinggakab.go.id>) dan e-kinerja (e-kinerja.purbalinggakab.go.id) belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi
4. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar pemberian *Reward and Punishment* dalam hal pemberian tambahan penghasilan pegawai.

c. Pelaporan Kinerja

1. Laporan kinerja tahunan 2023 belum dipublikasikan pada website Kecamatan Purbalingga;
2. Pembahasan penyusunan laporan kinerja dan capaian kinerja berkala telah dilaksanakan, namun informasi dalam dokumentasinya belum memadai dan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan;
3. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan, didokumentasikan, dan dipantau tindak lanjutnya.

d. Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Rapat/monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kinerja. Selain itu, rekomendasi-rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan upaya tindak lanjut belum terdokumentasi dan dimonitor pelaksanaannya dengan baik;
2. Terdapat rekomendasi berulang baik pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP maupun pada Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Purbalingga.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kecamatan Karangjambu guna perbaikan implementasi SAKIP di tahun – tahun berikutnya adalah :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Mengunggah dan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada esr.menpan.go.id dan website Kecamatan Purbalingga tepat waktu.
- b. Menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan ketentuan Permen PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan Pohon Kinerja;
- c. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - 1) Menyusun indikator Kinerja sub Kegiatan dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 2) Menyusun Matrik Rencana Kerja sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah kabupaten Purbalingga.
 - d. Menyusun target-target kinerja triwulanan pada rencana aksi dengan baik agar benar-benar menggambarkan kebutuhan yang ingin dicapai.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja triwulanan agar target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi dapat tercapai.
2. Pengukuran Kinerja
- a. Mendokumentasikan secara memadai hasil rapat – rapat/monitoring dan evaluasi kinerja agar sesuai strategi, kebijakan dan aktivitas dapat terpantau efektifitasnya;
 - b. Melakukan reviu terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja agar indicator dan target kinerja diterapkan secara konsisten dalam mengukur kinerja organisasi terutama pada dokumen Rencana Aksi, PPS dan PKPK.
 - c. Mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi pengumpulan dan pengukuran kinerja yang tersedia yaitu E-SAKIP (<https://sakup.purbalinggakab.go.id>) dan e-kinerja (e-kinerja.purbalinggakab.go.id) ;
 - d. Meningkatkan pengendalian terhadap mekanisme pemberian *Reward and Punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam hal pemberian tambahan penghasilan pegawai.
3. Pelaporan Kinerja
- a. Meningkatkan pengendalian terkait penyelesaian LKJIP, sehingga tidak terlambat untuk diunggah di website Kecamatan Pubalingga;
 - b. Meningkatkan kualitas informasi pada dokumentasi pembahasan penyusunan laporan kinerja dan capaian kinerja berkala, dan menjadikan informasi tersebut menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan;
 - c. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh informasi yang

tertuang pada Laporan Kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggungjawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan.

4. Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Mendokumentasikan rapat monitoring dan evaluasi internal berkala dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi;
- b. Melakukan pengendalian agar tidak muncul pengulangan rekomendasi yang sama pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP maupun Laporan Kinerja Tahunan.

Selanjutnya atas rekomendasi tersebut, beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Purbalingga untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain :

1. Mendorong komitmen seluruh pegawai untuk berperan aktif pada peningkatan implementasi SAKIP baik pada tahap perencanaan, pengukuran maupun pelaporan kinerja.
2. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola SAKIP melalui kegiatan sosialisasi dan pembekalan SAKIP Tahun 2024.
3. Segera menindaklanjuti rekomendasi LHE AKIP Tahun 2024.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan adalah :

1. Evaluasi internal OPD belum dilaksanakan secara berkala, sehingga hambatan dan kendala atas pelaksanaan kinerja belum terpantau dengan baik;
2. Belum diterapkannya *reward and punishment* yang didasarkan pada Capaian Kinerja, sehingga belum sepenuhnya mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Mendorong evaluasi kinerja internal dan menyusun kebijakan *pemberian*

reward and punishment berbasis kinerja, sehingga akan mendorong setiap individu untuk bertanggungjawab atas target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja yang secara berkala.

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan" dan sasaran strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas SAKIP Kecamatan" yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatannya antara lain :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah;
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja tahun 2024 menunjukkan tren positif dalam peningkatan kualitas pelayanan, penguatan kelembagaan, serta implementasi akuntabilitas kinerja di Kecamatan Purbalingga.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARA TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PURBALINGGA

Dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, Kecamatan Purbalingga masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan antara lain :

- a. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki
- b. Sarana dan prasarana yang tersedia kurang lengkap dan tidak memadai
- c. Sistem kerja yang belum optimal

- d. Keterbatasan ketrampilan petugas dan
- e. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan

Sedangkan isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional.

Kecamatan Purbalingga memiliki 2 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3
PROFIL BUMDES KECAMATAN PURBALINGGA

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Linggamas	Jl. Cahyana Baru Kel. Penambongan Purbalingga	Keuangan : SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	Berkembang	Penambongan, Purbalingga
2.	Jati Berkah Lestari	Jalan Letnan Kusni Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga	- Pertanian : - - Jasa : persampahan - Peternakan : penggemukan sapi - Persewaan : - - Wisata : -	Tumbuh	Purbalingga

2. Kawasan rawan bencana

Sangat diperlukan adanya pemetaan daerah rawan bencana, agar masyarakat lebih waspada dan dapat bergerak cepat dalam mengantisipasi saat bencana akan terjadi, sehingga korban jiwa dapat ditekan saat terjadinya bencana. Di wilayah Kecamatan Purbalingga termasuk daerah rawan bencana banjir, angin ribut dan kebakaran.

3. Stunting

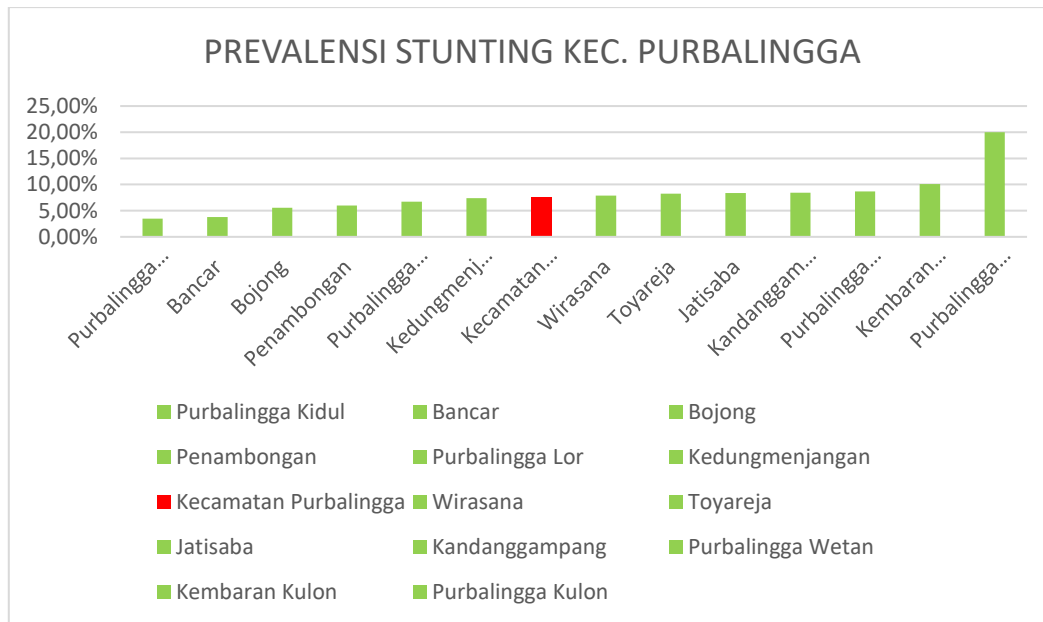
Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

Tabel 2. 4
PREVALENSI STUNTING KECAMATAN PURBALINGGA

Desa/Kelurahan	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KEC. PURBALINGGA	2660	25	182	201	7,56%
BANCAR	131	0	5	5	3,82%
BOJONG	270	3	12	15	5,56%
JATISABA	167	0	14	14	8,38%
KANDANG GAMPANG	142	0	12	12	8,45%
KEDUNG MENJANGAN	162	0	12	12	7,41%
KEMBARAN KULON	179	5	13	18	10,06%
PENAMBONGAN	134	3	5	8	5,97%
PURBALINGGA KIDUL	258	0	9	9	3,49%
PURBALINGGA KULON	110	4	18	22	20%
PURBALINGGA LOR	311	4	17	21	6,75%
PURBALINGGA WETAN	219	3	16	19	8,68%
TOYAREJA	157	3	10	13	8,28%
WIRASANA	420	0	33	33	7,86%

Sumber data : Puskesmas Purbalingga dan Bojong 2025

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN PURBALINGGA



Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 7 desa/kelurahan yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Kelurahan Wirasana, Desa Toyareja, Desa Jatisaba, Kelurahan Kandanggampang, Kelurahan Purbalingga Kulon, Kelurahan Kembaran Kulon dan Kelurahan Purbalingga Kulon.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengkonsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta;
6. Mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.

4. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

Tabel 2. 5 JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR

Kondisi Akhir ATS (orang)		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
201	97	170

Tabel 2. 6 JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

Kondisi Akhir ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
97	77	12

Pada Kecamatan Purbalingga terdapat 201 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 97 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 170 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 97 anak, SMP/SMPLB sejumlah 77 anak, SMA/SMALB sejumlah 12 anak, dan tidak sekolah sejumlah 57 anak.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat,

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah,
2. Program prioritas pembangunan daerah dan,
3. Rancangan Akhir Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Purbalingga berdasarkan RKPD Kabupaten Purbalingga sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi, Kecamatan Purbalingga dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”** Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah pengembangan lingkaran luar Kota Purbalingga sehingga pertumbuhan Kota Purbalingga mengarah ke Kecamatan Purbalingga baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata. Dalam hal ini Review Rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2. 7 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIRRKPD TAHUN 2026 KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Rencana Kerja Rencana Kerja SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Purbalingga	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu sesuai Ketentuan	100%	10.356.065.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Purbalingga	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu sesuai Ketentuan	100%	10.000.188.000	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Purbalingga	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	12 Bulan/ 100%	8.782.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Kec. Purbalingga	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	12 Bulan / 100%	9.262.500	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Purbalingga	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti	12 Bulan/ 100%	9.706.643.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Purbalingga	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti	12 Bulan / 100%	9.153.915.000	

3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Purbalingga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	12 Bulan/ 100%	47.469.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Purbalingga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	12 Bulan / 100%	45.669.500	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Purbalingga	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan/ 100%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Purbalingga	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan / 100%	10.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kec. Purbalingga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	12 Bulan/ 10	148.898.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kec. Purbalingga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	12 Bulan / 100%	148.898.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Purbalingga	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan/ 100%	37.350.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Purbalingga	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan / 100%	35.550.000	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Purbalingga	Cakupan Potensi Konflik yang dilaporkan Kecamatan Purbalingga	12	50.390.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Purbalingga	Cakupan Potensi Konflik yang dilaporkan Kecamatan Purbalingga	12	32.862.000	

1.	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Purbalingga	IKM Pelayanan Publik	12 Bulan/ 100%	20.638.000	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Purbalingga	IKM Pelayanan Publik	12 Bulan / 100	50.638.000	
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Purbalingga	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani	12	3.918.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Purbalingga	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani	12	1.590.000	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Purbalingga	Cakupan Desa Maju dan Mandiri	50%	83.693.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Purbalingga	Cakupan Desa Maju dan Mandiri	50%	99.563.500,00	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Purbalingga	Cakupan Desa Maju dan Mandiri	50%	36.591.000,00	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Purbalingga	Cakupan Desa Maju dan Mandiri	50%	36.591.000,00	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Purbalingga	Manajemen terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum membaik	100 %	47.453.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Kec. Purbalingga	Manajemen terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	37.320.000,00	

						KETERTIBAN UMUM		membaik			
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Purbalingga	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan	2 per 10.000 penduduk	47.453.000,00	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	Kec. Purbalingga	Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan	2 per 10.000 penduduk	37.320.000,00	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Purbalingga	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan	0,099 per 10.000 penduduk	52.602.500,00			Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan	0,099 per 10.000 penduduk	97.263.500,00	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah	Kec. Purbalingga	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan	0,099 per 10.000 penduduk	39.954.000,00	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Purbalingga	Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan	0,099 per 10.000 penduduk	39.954.000,00	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Purbalingga juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM dan dari musrenbang desa dan kelurahan. Namun demikian dengan pertimbangan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

1. Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa dan kelurahan yang memenuhi kriteria :
 - a. Bersifat lintas desa / kelurahan
 - b. Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat
2. Memilah dan memilih usulan berdasarkan kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.
3. Memilih dan memilah berdasarkan bidang berdasar bidang urusan dan kewenangan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan dibawa ketingkat form Perangkat Daerah Kabupaten, sesuai bidang yang menangan.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Purbalingga pada tahun 2025 dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan Otonomi Daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya
2. peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkopimcam, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Mempedomani amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan pejabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif dengan mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan Nasional, maka perlu mempedomi 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Visi dan misi Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk “NGOPENI, NGLAKONI Jateng”. Dengan landasan

filosofis tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah: “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Guna mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah selama tahun 2025-2029 digunakan beberapa indikator antara lain:

1. Angka Kemiskinan
2. PDRB Per Kapita
3. Indek Reformasi Birokrasi
4. Indeks Integritas Nasional
5. Indeks Demokrasi Indonesia
6. Otonomi Fiskal Daerah
7. Pertumbuhan Ekonomi
8. Inflasi
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
10. Indeks Modal Manusia

11. Tingkat Pengangguran Terbuka

Selanjutnya, pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada kebijakan “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”. Tahun 2026 ini juga diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis;
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan;
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter:

Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 “Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2026 dilaksanakan dengan tema “Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik sebagai Fondasi Ketahanan Pangan dan Ekonomi Inklusif”. Secara holistik pembangunan Kabupaten Purbalingga, untuk mendukung tema pembangunan tersebut didukung oleh perencanaan yang komprehensif dari hulu sampai hilir yang diawali dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi, tertuang dalam program utama sebagai berikut:
 - a. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, melalui:
 - Menciptakan proyek berbasis kemitraan publik-swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas ekonomi;
 - Revitalisasi dan realisasi program infrastruktur yang mangkrak melalui kolaborasi dengan seluruh *stakeholders* di tingkat nasional, provinsi dan lintas daerah.
 - b. Pembangunan yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan hidup sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya masalah

sampah, tatakelola lingkungan masyarakat marginal di bantaran sungai dan wilayah pinggiran.

2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian, tertuang dalam program utama sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD, melalui:
 - Kolaborasi investasi dan peningkatan infrastruktur
- b. Peningkatan kemakmuran masyarakat dengan meningkatkan pendapatan per kapita, melalui:
 - Penyelenggaraan program inkubator dan akselerator wirausaha baru;
 - Fasilitasi *link and match* untuk UMKM lokal dengan pemain nasional dan global untuk meningkatkan akses pasar dan pendapatan;
 - Memperkuat daya saing komoditas unggulan Kabupaten Purbalingga di tingkat nasional.
- c. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, melalui:
 - Penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif;
 - Membangun kolaborasi *job-fair* bersama perusahaan nasional dan daerah untuk penyerapan angkatan kerja.
- d. Dukungan untuk wirausaha muda dan UMKM, melalui:
 - Pendirian pusat kreatif (*creative center*) dan *startup center* di setiap kecamatan untuk mendukung generasi milenial & generasi Z (gen- MZ) dan wirausaha muda;

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul, tertuang dalam program utama sebagai berikut:

- a. Peningkatan layanan pendidikan, melalui:
 - Pemberian beasiswa untuk pelajar hingga jenjang vokasi;
 - Renovasi sekolah SD dan SMP;
 - Penghargaan tahunan bagi guru kreatif dan inovatif melalui Bupati Award.
- b. Peningkatan layanan kesehatan, melalui:
 - Peningkatan kelas layanan puskesmas;
 - Pemberian kesejahteraan kader posyandu;

- Menyediakan layanan kesehatan gratis untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
- c. Pembinaan olahraga terpadu untuk generasi muda yang mencakup pelatihan intensif, peningkatan fasilitas olahraga, dan dukungan kompetensi untuk mengembangkan bakat dan membangun karakter sampai tingkat kecamatan dan desa.
4. Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi, tertuang dalam program utama sebagai berikut:
- a. Kepemimpinan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, melalui:
- Program *Open-House* Bupati untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat;
 - Pelibatan kontribusi para tokoh masyarakat, ulama dan tokoh agama, teknokrat dan birokrat untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan kolaboratif.
- b. Reformasi birokrasi dan struktur pemerintahan dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan reformasi struktur pemerintahan hingga ke tingkat RT yang inovatif, melalui:
- Peningkatan dana operasional RT dan penghargaan RT berprestasi;
 - Pemberian dana bergulir dan mobil operasional desa untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan efektifitas layanan dan kegiatan di desa.
- c. Pelayanan pemerintah dan pembangunan yang kolaboratif berbasis inovasi dan teknologi, melalui:
- Digitalisasi layanan publik dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga inovasi nasional guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah.

Tabel 3. 1
Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga dan Target Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN
				2024	2025	2026
TUJUAN DAERAH						
	Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Ribu Rupiah	32.090	35.000 - 36.000	36.000 - 38.000
		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB	Persen	1,06	1,07	1,13
		Angka Kemiskinan	Persen	14,18	14,06 – 12,86	12,86 - 11,86
		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,97	71,63	71,96
		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,96	82,5	83
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	tonCO ² eq	448.472,89	522.952,69	609.801,67
SASARAN DAERAH						
1.	Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55	4,5 - 5,3	5,3 - 5,7
		Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,314	0,31	0,35
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	4,96	4,96 - 4,79	4,79 - 4,5
		Indeks Ketahanan Pangan	Angka	78,47	80,32	80,7
2.	Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	64,66	66,09	68,32
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	75,28	77,05	77,22
4.	Terwujudnya Birokrasi yang Inovatif, Prima dan Berintegritas	Nilai SAKIP	Angka	68,1	70,01	70,5
		Indeks Integritas Nasional	Angka	77,18	78	78,5
5.	Terwujudnya Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Desa	Angka	76,24	78,84	79,12
6.	Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul serta Ketahanan Sosial yang Adaptif	Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten	Persen	84,04	86,01	88,02
		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,19	74,23	74,61
		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,05	62,43 - 63,94	63,19 - 64,7
7.	Meningkatnya Kehidupan yang Harmonis	Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	per 10.000 penduduk	0,78	0,75	0,72

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PURBALINGGA

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga maka perlu dijabarkan kembali tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam renja Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

Tujuannya merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi.

Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang dirumuskan untuk fokus pada penyusunan kebijakan dan program yang dapat diukur dalam pencapaian Sasaran Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2
TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PURBALINGGA 2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2025	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	88	89	90
		1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	62	64	66	68	70
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PURBALINGGA

Rencana Program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu

indikatif, klafikasi program dan kegiatan Kecamatan Purbalingga.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian misi Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan Kegiatan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purbalingga Tahun 2026, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga,
- 2) Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya,
- 3) Pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi Kepala Daerah terpilih,
- 4) Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya,
- 5) Pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

A. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Purbalingga maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdaya Masyarakat Desa /Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintaha Desa

B. KEGIATAN

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan Tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah

digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten,** meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2) Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan /Verifikasi Keuangan PD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Fasilitas kunjungan Tamu
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
 - 5) Dukungan Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum,** meliputi

kegiatan :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa;
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya Masyarakat di wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- 2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,
meliputi kegiatan :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 2) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Purbalingga merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Purbalingga selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Purbalingga.

Rencana Kerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2026, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purbalingga Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Purbalingga Tahun 2026 disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01			PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA (GENERIK)	Prosentase ketersediaan laporan kinerja		100%	10.599.950.000	APBD	100%	10.860.498.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Purbalingga	1 dokumen	1.288.000	APBD	1 dokumen	10.000.000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	Kec. Purbalingga	1 Dokumen	880.000	APBD	1 Dokumen	6.000.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Purbalingga	6 laporan	408.000	APBD	6 laporan	4.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Purbalingga	100%	10.241.822.000	APBD	100%	10.586.682.000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Purbalingga	84 org/bln	10.225.926.000	APBD	84 org/bln	10.558.486.000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kec. Purbalingga	150 Dokumen	1.296.000	APBD	150 dokumen	1.296.000

					ASN	ASN						
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi PD	Kec. Purbalingga	3 Dokumen	14.600.000	APBD	3 dokumen	26.900.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada PD	Kec. Purbalingga	100%	7.789.000	APBD	100%	900.000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD	Tersedianya honor pengurus barang	Kec. Purbalingga	12 bulan	7.789.000	APBD	12 bulan	900.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Purbalingga	12 Bulan	20.524.000	APBD	12 Bulan	19.666.000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Purbalingga	12 bulan	466.000	APBD	12 bulan	966.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kec. Purbalingga	12 bulan	13.658.000	APBD	12 bulan	10.600.000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Purbalingga	50 orang	3.400.000	APBD	50 orang	1.000.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Kec. Purbalingga	12 kegiatan	800.000	APBD	12 kegiatan	3.800.000
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada PD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	Kec. Purbalingga	12 bulan	2.200.000	APBD	12 bulan	3.300.000

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	Kec. Purbalingga	0	0	APBD	1 unit	4.000.000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Purbalingga	0	0	APBD	1 unit	4.000.000
7	01	01	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Kec. Purbalingga	100%	155.770.000	APBD	100%	155.770.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kec. Purbalingga	12 bulan	46.110.000	APBD	12 bulan	46.110.000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Purbalingga	12 bulan	200.000	APBD	12 bulan	1.000.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Purbalingga	12 bulan	108.660.000	APBD	12 bulan	108.660.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Purbalingga	12 bulan	172.957.000	APBD	12 bulan	87.480.000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Kec. Purbalingga	12 bulan	76.480.000	APBD	12 bulan	71.480.000

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Purbalingga	9 Unit	5.000.000	APBD	9 unit	6.000.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Purbalingga	1 Unit	91.477.000	APBD	1 unit	10.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Kec. Purbalingga	3.4	182.651.000	APBD	3,4	43.712.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	Kec. Purbalingga	12 dokumen	180.411.000	APBD	12 dokumen	41.472.000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Purbalingga	12 dokumen	180.411.000	APBD	12 dokumen	41.472.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Pada Camat	Jumlah pelayanan yang diselesaikan	Kec. Purbalingga	11 jenis	2.240.000	APBD	11 jenis	2.240.000
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	Kec. Purbalingga	12 Dokumen	2.240.000	APBD	12 Dokumen	2.240.000

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	Kec. Purbalingga	100%	63.838.000	APBD	100%	42.723.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi lembaga dan forum kemasyarakatan	Kec. Purbalingga	100%	63.838.000	APBD	100%	42.723.000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Kec. Purbalingga	2desa/11 kelurahan	6.013.000	APBD	2desa/11 kelurahan	14.200.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Purbalingga	12 kegiatan	57.825.000	APBD	12 kegiatan	28.523.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Kec. Purbalingga	12 Dok	28.073.000	APBD	12 Dok	44.373.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelengaran Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasioanal Indonesia dan Istansi vertical di wilayah Kecamatan	Kec. Purbalingga	12 Dok	28.073.000	APBD	12 Dok	44.373.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi	Kec. Purbalingga	12 Laporan	22.200.000	APBD	12 Laporan	23.500.000

					Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	vertikal di wilayah kecamatan							
7	01	04	2.01		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Purbalingga	6 Laporan	5.873.000	APBD	6 laporan	20.873.000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	Kec. Purbalingga	100%	29.185.000	APBD	100%	29.185.000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Purbalingga	100%	29.185.000	APBD	100%	29.185.000	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Purbalingga	50 Orang	29.185.000	APBD	50 orang	29.185.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	Kec. Purbalingga	100%	400.000	APBD	100%	2.000.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pemerintahan desa yang dibina oleh kecamatan	Kec. Purbalingga	100%	400.000	APBD	100%	2.000.000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi, Administrasi Tata	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam	Kec. Purbalingga	2 dokumen	1.000.000	APBD	2 dokumen	1.000.000	

					Pemerintahan Desa	rangka administrasi Tata pemerintahan desa						
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi pemilihan kepala desa	Kec. Purbalingga	-	-	APBD	2 kegiatan	1.000.000

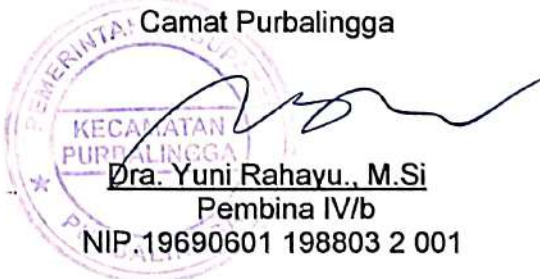
BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 ini, disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas Tingkat Provinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga ini memuat tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja, program/kegiatan serta pagu yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah Rancangan Akhir Rencana Kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dalam mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purbalingga Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Dalam melaksanakan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 21 Juli 2025


Camat Purbalingga
Dra. Yuni Rahayu., M.Si
Pembina IV/b
NIP. 19690601 198803 2 001